

BAB II

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait pengertian dari Sustainable Development Goals (SDGs) serta terkait masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan juga terkait kebijakan-kebijakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1 tanpa kemiskinan. Pada bagian pertama akan mengulas tentang bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, serta juga dampak sosial dan ekonominya, pembahasan ini juga akan mencakup berbagai dimensi kemiskinan seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Pada bagian yang kedua akan membahas tentang strategi serta kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan khususnya pada tujuan poin pertama yaitu, No Poverty, pada pembahasan yang kedua ini akan mencakup program-program yang konkret. Dengan memfokuskan sub bab ini kemiskinan serta implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) No Poverty di tingkat lokal, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan upaya konkret yang dilakukan di Indonesia khususnya di Gresik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

2.1 Pengertian Sustainable Development Goals

Pembangunan nasional di suatu negara atau wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Adapun salah Satu kegiatan Pembangunan nasional yang Akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke seluruh daerah, terutama pembangunan di daerah yang relatif memiliki penduduk yang tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Pembangunan itu sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan prioritas dan kebutuhan sesuai daerah masing-masing dengan akar dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui suatu program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Pada indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia sedang giat mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dimulai pada tahun 2015 dan dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2030. Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals (MDGs). MDGs adalah bagian dari Deklarasi Milenium yang merupakan hasil kesepakatan antara kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program MDGs sendiri mulai

dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi tersebut mencakup delapan tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Tujuan-tujuan ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan global, yang dituangkan dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada September 2000. Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan menandatangani Deklarasi yang mencerminkan komitmen setiap negara dan komunitas internasional untuk mencapai delapan tujuan pembangunan dalam MDGs sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.¹

Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-Indonesia/>

¹ Novianto, ' millenium development goals', 2020. <https://koinworks.com/blog/millenium-development-goals/>

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, yang mana hal ini telah diadopsi oleh semua negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs dan memiliki 17 Tujuan Berkelanjutan:²

1. Tanpa kemiskinan (no poverty)
2. Tanpa kelaparan (zero hunger)
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being)
4. Pendidikan berkualitas (quality education)
5. Kesetaraan gender (gender equality)
6. Air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation)
7. Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy)
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth)
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure)
10. Berkurangnya kesenjangan (reduced inequality)
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (sustainable cities and communities)
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (responsible consumption and production)
13. Penanganan perubahan iklim (climate action)
14. Ekosistem lautan (life below water)
15. Ekosistem daratan (life on land)

² SDGs Indonesia, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, <https://sdgs.bappenas.go.id/> (29/08/2024 WIB)

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh (peace, justice, and strong institutions)

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnership for the goals)

Dalam proses pencapaian target MDGs, setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda. Beberapa negara berhasil memenuhi target tersebut, sementara yang lain mengalami kesulitan. Keberhasilan ekonomi China telah mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, terlihat dari penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa komitmen negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang dan tertinggal belum sepenuhnya terealisasi. Walaupun program MDGs telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan, banyak pihak merasa bahwa pencapaiannya masih jauh dari yang diharapkan hingga berakhir pada tahun 2015.³

Kekurangan MDGs terletak pada beberapa aspek: 1) target yang hanya mengurangi separuh kemiskinan dianggap terlalu rendah karena banyak negara sudah mencapainya sebelumnya, 2) program ini menganggap negara miskin dan berkembang harus mengatasi masalah mereka sendiri, sementara negara maju hanya menyediakan dana, 3) dokumen MDGs disusun oleh para elite PBB dan OECD di New York tanpa konsultasi atau survei terhadap masyarakat, dan 4) delapan tujuan MDGs sebagian besar hanya menangani gejala kemiskinan, dengan

³ E. Widari, S., Bachtar, N., & Primayesa, 'Faktor Penentu Stunting: Analisis Komparasi Masa Millenium Development Goals (MDGs) Dan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia.', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (2021) <<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1726>>.

masalah ekologi, lingkungan hidup, serta isu pajak dan pembiayaan pembangunan kurang mendapatkan perhatian.⁴

Pada 26 September 2015, dalam Sidang Umum PBB di New York, Program MDGs secara resmi dinyatakan selesai. Seluruh 193 negara anggota PBB yang hadir memutuskan untuk melanjutkan MDGs dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk lima belas tahun ke depan. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana aksi global yang disetujui oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku secara universal, sehingga setiap negara, termasuk negara maju, memiliki tanggung jawab moral untuk mencapai Tujuan dan Target yang telah ditetapkan.⁵

Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup berbagai isu terkait pembangunan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Sustainable Development Goals (SDGs) juga dikenal sebagai "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) dikembangkan untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan

⁴ Ibid

⁵ Ibid

MDGs, yang membedakan antara negara maju dan berkembang, Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku untuk semua negara secara universal.⁶

Target dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menunjukkan kemajuan dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan baik di dalam maupun antar negara, meningkatkan pengelolaan air dan energi, serta menangani perubahan iklim secara mendesak. Hal ini tercermin dalam tiga pilar Sustainable Development Goals (SDGs): ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara umum, pilar, target, dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Berbeda dengan Millennium Development Goals (MDGs) sebelumnya, Sustainable Development Goals (SDGs) dikembangkan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, dan akademisi. Sekitar 8,5 juta suara warga dari seluruh dunia juga berkontribusi pada tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDGs).⁷

1.2 Kemiskinan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mana memiliki banyak sekali sumber daya alam di dalamnya. Sebuah kekayaan jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mungkin akan membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi, namun. Negara Indonesia masih termasuk kedalam negara yang berkembang dan tentunya

⁶ N. Handoyo, R., Sofie, S., & Wardhani, 'Mplementasi Sustainable Development Goals (Sdgs), Goal 8 Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Padas, Kecamatan Karangnom Dan Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1) (2023), pp. 107-116. <<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jat/article/view/16234>>.

⁷ Ibid

masih memiliki sejumlah permasalahan sosial, budaya, serta masalah ekonomi yang perlu diperhatikan, permasalahan tersebut termasuk mengenai kemiskinan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa seluruh Sumber Daya Alam vital yang dimiliki adalah seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh negara demi kepentingan dan juga kemakmuran rakyat Indonesia. kemiskinan merupakan sebuah masalah yang serius yang mana dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal itu diantaranya seperti tingkat pendidikan, geografis, karakter, budaya, dan juga lainnya.⁸

Menurunkan angka kemiskinan merupakan suatu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau (RPJPN 2005-2025) yang mana ini sejalan dengan agenda pembangunan millenium, Hal ini sesuai dengan Agenda Pembangunan Milenium, sebuah deklarasi yang diadopsi oleh 189 negara setelah disepakati oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Deklarasi ini dikenal sebagai "Tujuan Pembangunan Milenium" (Millennium Development Goals – MDGs), yang terdiri dari 8 tujuan : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu hamil, Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit, Memastikan kelestarian lingkungan dan mengembangkan

⁸ Sari Wulandari, 'Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.Maret (2022), Pp. 3209–18 <<https://www.neliti.com/publications/470049/kebijakan-anti-kemiskinan-program-pemerintah-dalam-penananggulangan-kemiskinan-d>>.

kemitraan global untuk pembangunan.⁹ Secara keseluruhan tahun 2015 Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia telah mencapai 71 persen yang di mana dari total 72 indikator, 51 indikator telah berhasil tercapai, tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang berhasil dicapai yaitu tujuan yang ketiga dan keempat indikator, sementara itu sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang indikatornya paling banyak belum tercapai yaitu kesatu dan ketujuh yakni masing-masing tujuh dan enam indikator.¹⁰

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan dan non pangan dengan membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikonsumsi per-bulan, maka akan dapat membedakan seseorang itu miskin atau tidak. menurut definisi UNDP (United Nations Development Programme) atau Badan Program Pembangunan (PBB). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memperluas pilihan hidup. Kemiskinan didefinisikan lebih luas dengan memasukkan kurangnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik indikator kemiskinan.¹¹

Permasalahan mengenai kemiskinan telah menjadi isu global yang membebani banyak negara di seluruh dunia yang mana dalam penekanan pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terkhusus pada tujuan yang pertama yaitu, tanpa kemiskinan atau penghapusan kemiskinan dalam segala

⁹ Ibid

¹⁰ Armida Salsiah. Endah Murniningtyas Alisjahbana, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep Target Dan Strategi Implementasi, Cetakan 2, (Bandung : Unpad Press, 2018).

¹¹ Ibid

bentuk.¹² Pada skema 1 di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin sesuai data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) pada bulan Maret 2024 terdapat 22,55 juta orang di Indonesia yang mana dianggap miskin dari data ini bahwa bisa dilihat berangsur menurun dari Maret 2023 dan 2021, namun meski terjadi penurunan berkelanjutan dalam tingkat kemiskinan, angka tersebut masih tinggi serta menunjukkan ketimpangan di antara penduduk. Hasil laporan dari Bank Dunia bahwa Indonesia berada pada tingkat kelima dari urutan tertinggi di antara negara-negara ASEAN berdasarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 pada tingkat kemiskinan mencapai 9,71% di bawah negara Kamboja, Laos, Filipina dan Myanmar.¹³

Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). Sejak deklarasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada September 2015, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum global. Di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia telah menyesuaikan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Nawacita sebagai visi pembangunan nasional, yang tercermin dalam kebijakan, strategi, dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan beserta dokumen anggarannya. Dalam pelaksanaannya, Indonesia konsisten dengan prinsip-prinsip Sustainable

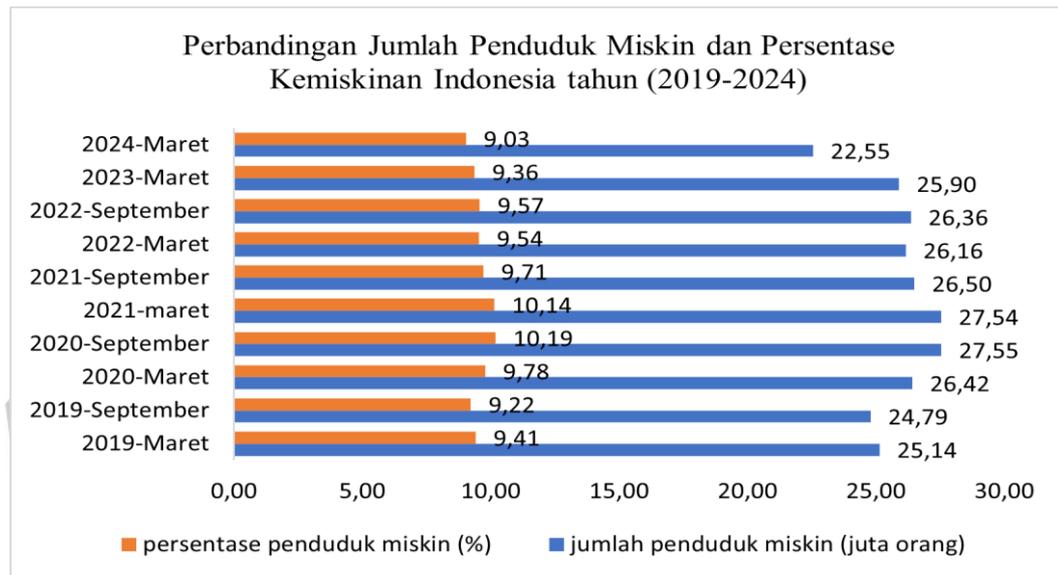
¹² Mira Permata Sari, Nurfahmiyati, and Ima Amaliah, 'Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2019', Bandung Conference Series: Economics Studies, 2.1 (2022), pp. 84–92, doi:10.29313/bcses.v2i1.1309.

¹³ Putri Diyan Safitri and Edi Susilo, 'Analisis Pengaruh Inklusifitas Keuangan Syariah, Pendidikan Dan Ketimpangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun (2019-2023)', Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8.2 (2024), pp. 265–88, doi:10.31955/mea.v8i2.4028.

Development Goals (SDGs), yaitu prinsip pembangunan universal, integrasi, tidak ada yang tertinggal, dan prinsip inklusif.¹⁴

Skema 2. 1 Perbandingan jumlah penduduk miskin dan persentase

kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2024



(sumber : www.bps.go.id)

Gambar tersebut menunjukkan grafik perbandingan antara jumlah penduduk miskin (dalam juta orang) dan persentase kemiskinan di Indonesia dari Maret 2019 hingga Maret 2024. Berikut adalah pembahasan mengenai data yang disajikan, Dari grafik terlihat bahwa persentase penduduk miskin secara umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Maret 2019, persentase kemiskinan berada di angka 9,41%, yang kemudian menurun menjadi 9,03% pada Maret 2024. Ini menunjukkan adanya upaya signifikan dari pemerintah dalam

¹⁴ Ibid

mengurangi kemiskinan. Penurunan ini juga tercermin dalam jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta orang, yang kemudian menurun menjadi 22,55 juta orang pada Maret 2024.

Pada tahun 2020, terlihat peningkatan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan. Pada Maret 2020, persentase kemiskinan mencapai 9,78% dengan 26,42 juta orang. Peningkatan ini bisa dikaitkan dengan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Puncak kemiskinan terlihat pada Maret 2021 dengan 10,14% (27,54 juta orang). Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi masih dirasakan secara signifikan pada awal 2021. Setelah puncak pada Maret 2021, tren menunjukkan perbaikan. Pada September 2022, persentase kemiskinan menurun menjadi 9,54% dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 26,16 juta orang. Penurunan ini terus berlanjut hingga Maret 2024 dengan persentase kemiskinan menjadi 9,03% dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,55 juta orang. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang berhasil menekan angka kemiskinan.

Pada penanggulangan kemiskinan selama ini bertumpu kepada konsep kemiskinan dari badan pusat statistik (BPS) yang berguna sebagai mengukur kemiskinan. *basic needs approach* merupakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar oleh BPS. Kemiskinan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran oleh karena itu, penduduk miskin merupakan penduduk

yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.¹⁵

kemiskinan merupakan sebuah masalah yang serius yang mana dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal itu diantaranya seperti tingkat pendidikan, geografis, karakter, budaya, dan juga lainnya.¹⁶ Permasalahan kemiskinan tidak hanya ditemukan pada tingkat desa, pada daerah perkotaan kemiskinan dapat dengan mudah ditemukan, kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah ada sejak zaman sebelum reformasi Indonesia yang menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah di negara yang ada di dunia khususnya di Indonesia, banyak kebijakan-kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah guna sebagai penekan angka kemiskinan meskipun hasil yang didapatkan belum sepenuhnya diharapkan.

Upaya dari pemerintah Indonesia sendiri dalam menurunkan angka melalui program-program pembangunan yang terkhusus di pedesaan serta berupaya memberikan bantuan pangan dan bantuan pangan non tunai, bantuan tunai bersyarat, kartu pra-kerja, kartu Indonesia pintar kuliah serta kartu sembako murah. Dari bantuan tersebut telah dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang mana berhak menerimanya. Serta pada tingkat kemiskinan yang begitu tinggi dapat menyebabkan angka kelaparan yang tinggi di Indonesia, terdapat penduduk

¹⁵ Arifin Johan, 'Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.Mei (2020), Pp. 1–23 <<https://www.academia.edu/download/103183254/1190.pdf>>.

¹⁶ Ibid

Indonesia yang masih banyak tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka terlebih yang berada pada wilayah Indonesia timur.

Penyebab dari Kemiskinan yang ada di Indonesia itu tidak bisa dilihat dari satu faktor saja, namun harus mempertimbangkan berbagai segi baik dari faktor struktural maupun kultural mempunyai kontribusi yang hampir sama atau seimbang. Di Indonesia kemiskinan dapat terlihat dengan adanya budaya miskin yang mana telah terpelihara oleh masyarakat sendiri yang mana masih kurang sadarnya mempunyai semangat untuk memperbesar penghasilan, dari kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia masih belum bisa untuk melibatkan masyarakat secara rata yang berakibat penduduk miskin kesulitan mengakses sumber-sumber modal untuk memperbesar pemasukan atau pendapatan.¹⁷

Terdapat program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan tujuan memfokuskan kepada arah pembangunan seperti, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat yang berada pada garis kemiskinan, menyempurnakan serta memperluas program pembangunan dengan pelaku dari masyarakat, meningkatkan akses masyarakat yang berada di garis kemiskinan kepada pelayanan dasar, serta membangun dan menyempurnakan sistem dari perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dari kelima yang mana merupakan fokus utama dari program pemerintah diharapkan jumlah dari masyarakat miskin dapat teratasi meskipun tidak menyeluruh dengan kerja sedikit demi sedikit, tidak

¹⁷ Ibid., hal. 4

hanya itu terdapat langkah pemerintah terkait lima program yakni, dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama sembako.¹⁸

Sekitar 40% Indonesia sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada pertengahan 1970-an hingga 9,22% di tahun 2019 dan pada kurun waktu tersebut tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan yang begitu sangat krisis 1997-1998 dan pada tahun 2006-2007.¹⁹ Begitu juga yang dialami Indonesia pada saat pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78% pada bulan Maret 2020 dan 10,19% pada bulan September 2020. Pemerintah sendiri menggunakan berbagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dimana ada dua strategi utama. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan juga subsidi. Yang kedua, pemerintah melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan juga yang rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Kemiskinan yang bersifat multidimensional artinya bahwa kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan faktor sosial, ekonomi seperti tingkat kualitas pendidikan, kondisi kesehatan dan jenis pekerjaan.²⁰

Pemerintah sendiri menekankan pentingnya intervensi pendidikan pada usia dini yang mana dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan intervensi pada usia dewasa, untuk itu pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Stunting, dan juga memperluas akses terhadap sistem pendidikan dengan

¹⁸ Ibid., hal. 5

¹⁹ K.H Ma'ruf Amin, 'Strategi Penanggulangan Kemiskinan', *Masyarakat Ekonomi Syariah*, 2021 <<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/05/19/strategi-penanggulangan-kemiskinan/>>.

²⁰ Ibid

tujuan memutus rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan generasi selanjutnya. Akses kesehatan juga sangat dipedulikan oleh pemerintah guna mencegah kemiskinan dengan pemerintah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan salah satu program kesehatan berbasis asuransi sosial yang terbesar di dunia.²¹

Kesehatan dan juga pendidikan bisa saja menjadi pengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan dan juga kesehatan merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Kesehatan menjadi tingkat yang sangat mempengaruhi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia serta memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, oleh sebab itu kesehatan merupakan faktor utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi kesehatan menjadi poin utama pemerintah sebagai penyelenggara publik. Jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dengan memberi pelayanan kesehatan secara adil, merata dan berkualitas. Selain kesehatan, pendidikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan salah satu pondasi yang penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan manusia, tanpa adanya pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan pengetahuan maka akan kurang dalam meningkatkan keefektivitasan, namun pada tingkat pendidikan di Indonesia sudah ditingkatkan sejak kemerdekaan namun masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia secara maksimal.²²

²¹ Ibid

²² Nila Isroviyah, 'Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020', *Jurnal Penelitian*, 2020, pp. 1-23 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8146/6920>>.

2.2 Kebijakan Pemerintah Gresik Mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) No Poverty

kemiskinan menjadi permasalahan yang sering terjadi di setiap provinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Begitu juga yang alami pada Kabupaten Gresik, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur, seperti yang dikatakan menteri sosial Indonesia yakni, Tri Rismaharini bahwa keadaan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 yang mana angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berkisar 12,40% yang mana merupakan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yaitu 11,90%.²³

Permasalahan dasar yang sering terjadi adalah jumlah penduduk, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak teratur dan juga tidak terkendali akan bisa berdampak pada penekanan jumlah angka kemiskinan, jumlah penduduk sendiri bisa berubah dengan pengaruh dari kematian, kelahiran. Sumber daya alam makin berkurang sehingga menjadi kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan populasi yang mana pada setiap hari akan mengalami pertambahan. Oleh karena itu akan mendorong manusia lebih dekat ke garis kemiskinan.²⁴

²³ Hamzah Arfah, 'Angka Kemiskinan DI Gresik Tinggi', 2021 <https://regional.kompas.com/read/2021/03/27/152056578/angka-kemiskinan-di-gresik-tinggi-risma-kalau-realitasnya-seperti-itu#google_vignette>.

²⁴ Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, and Abubakar Hamzah, 'Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4.2 (2019), pp. 265–83, doi:10.24815/jped.v4i2.13022.

Tabel 2. 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Gresik 2021-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	2,15	0,61
2022	2,17	0,89
2023	1,63	0,38

(sumber : BPS Kabupaten Gresik 2023)

tabel ini menunjukkan dua indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selama periode 2021-2023, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan: Mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang artinya seberapa jauh pengeluaran orang miskin dari garis kemiskinan. Semakin rendah angkanya, semakin sedikit kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan: Mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri, menunjukkan seberapa merata atau tidaknya kemiskinan di kalangan orang miskin. Semakin tinggi angka ini, semakin besar ketimpangan di antara penduduk miskin.

Dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2021, indeks Kedalaman Kemiskinan: 2,15 dan Indeks Keparahan Kemiskinan: 0,61. Tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan: 2,17 (mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021), Indeks Keparahan Kemiskinan: 0,89 (terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021). Tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan: 1,63 (menurun cukup

signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya), Indeks Keparahan Kemiskinan: 0,38 (menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022). Dari data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan baik pada Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik. Ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di daerah ini membaik, dengan pengeluaran penduduk miskin yang lebih dekat ke garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin yang berkurang.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Gresik**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2021	166,35	12,42
2022	149,64	11,06
2023	149,75	10,96

(Sumber : BPS Kabupaten Gresik 2023)

Kabupaten Gresik dikenal sebagai pusat kawasan industri utama yang berada pada wilayah Jawa Timur serta home industry yang cukup banyak namun, kenyataannya Kabupaten Gresik yang mempunyai kawasan industri yang luas mempunyai permasalahan mengenai kemiskinan yang masih relatif tinggi. Kabupaten Gresik salah satu kabupaten yang menjadi pusat banyaknya pendatang penduduk desa untuk datang ke kota.²⁵ Pada 3 tahun terakhir tercatat pada data

²⁵ Ibid

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dimana pada tahun 2021 jumlah dari penduduk miskin yaitu, 166.35 ribu jiwa dengan persentase 12,42% sedangkan pada tahun 2022 penduduk miskin di Kabupaten Gresik berjumlah yaitu, 149,64 ribu jiwa dengan persentase 11,06%, dan pada tahun 2023 berjumlah 149,75 ribu jiwa dengan persentase 10,96%.²⁶

Kabupaten Gresik juga mempunyai visi misi yang mana bisa menjadi acuan dalam program-program pengentasan kemiskinan yang terjadi.

Visi

Membangun konektivitas yang Berkualitas dan Transparan antara Pemerintah dan Masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Masyarakat Adil Sejahtera yang Berbudaya dan Religius.

Misi

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah melalui peningkatan kualitas pelayanan barang dan jasa.
2. Mengoptimalkan penerimaan dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai acuan dasar penyusunan dan penyempurnaan produk hukum
3. Peningkatan pengawasan dan efisiensi pengelolaan pelayanan umum yang berbasis kemajuan dan pengetahuan masyarakat

²⁶ Bariyyatin Nafi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016-2019)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.02 (2021), pp. 953–60 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2206/1263>>.

4. Melibatkan nilai-nilai luhur yang agamis dan berbudaya dalam mengambil langkah dan keputusan kebijakan.²⁷

Apabila dilihat dari jumlah penduduk kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Gresik memang mengalami penurunan. akan tetapi, tingkat pada penurunan belum signifikan, dilihat dari angka kemiskinan provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik masih relatif tinggi angka kemiskinannya, yang mana jika dilihat dari hal tersebut masih belum berhasilnya usaha dari pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Gresik. Hal yang mendasar terjadinya jumlah penduduk miskin dan juga jumlah penduduk di Kabupaten Gresik yang sangat tinggi menjadikan faktor pemicu dari timbulnya penyebab jumlah tingkat pengangguran yang tinggi. Dimana Kabupaten Gresik yang mempunyai pusat industri yang luas serta memiliki home industri yang banyak seharusnya bisa membawa dampak yang baik bagi masyarakatnya, seharusnya banyak kesempatan untuk penduduk yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran bisa merubah kehidupannya, namun dari hal tersebut jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan masalah pada lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Gresik.²⁸

Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif diperlukan keterlibatan dari pemangku kepentingan, pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah serta juga masyarakat yang mana merupakan pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan, dalam

²⁷ <https://dprd.gresikkab.go.id/visi-dan-misi>

²⁸ Ibid

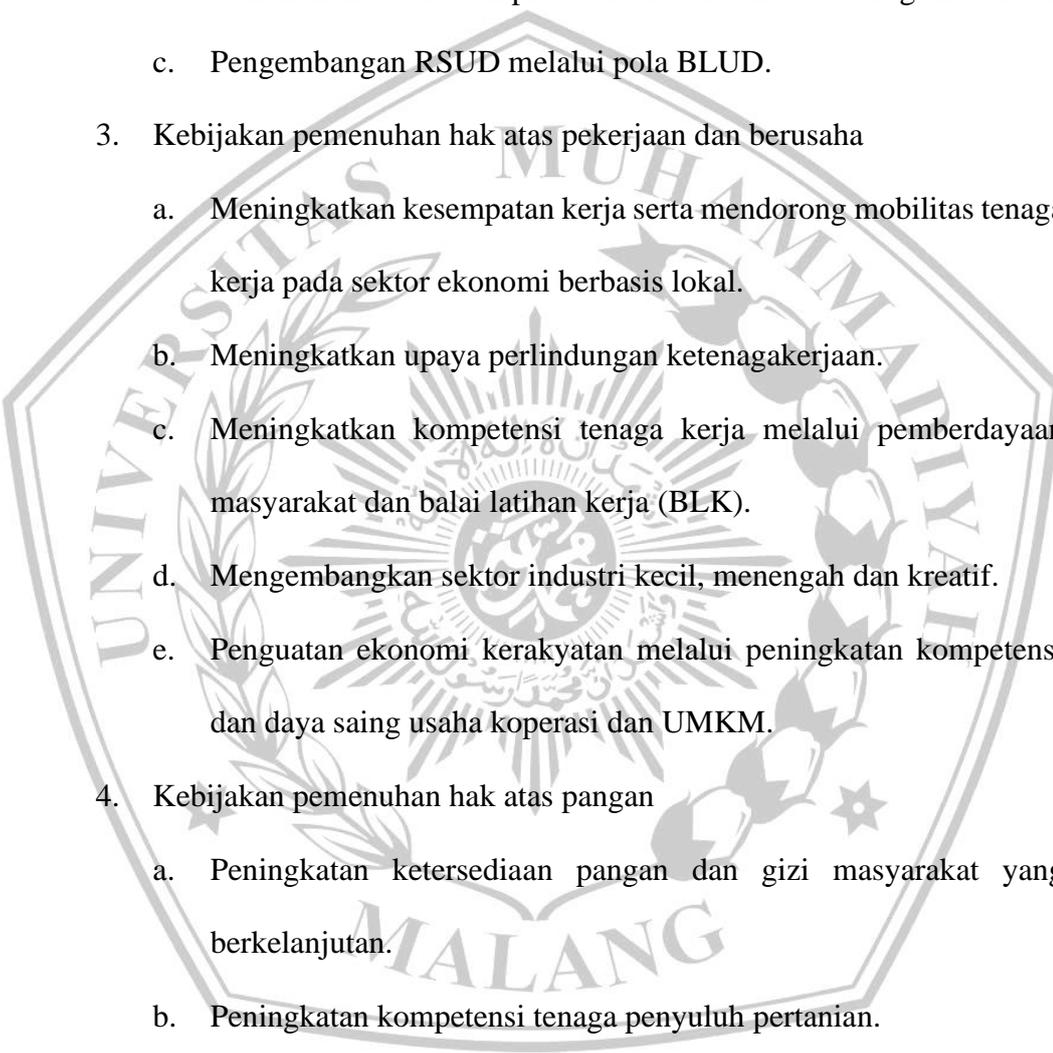
menunjang penanggulangan kemiskinan serta sebagai tindak lanjut dari strategi dari pemerintah maka pemerintah Kabupaten Gresik mengupayakan untuk kebijakan dari penanggulangan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan dengan mengeluarkan beberapa strategi. Yaitu,

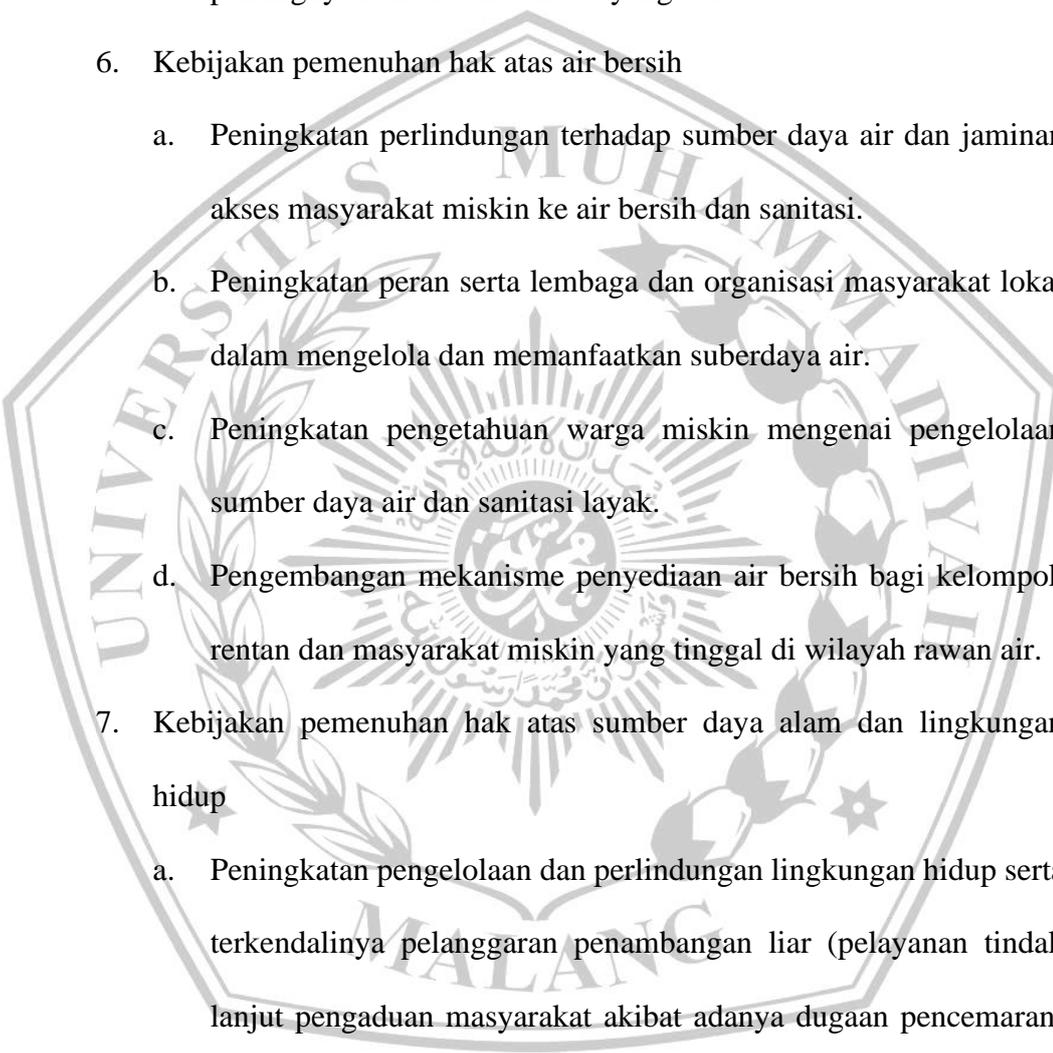
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha besar dan kecil,
4. Mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan,
5. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.²⁹

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik guna menangani masalah kemiskinan sebagai berikut,

1. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan
 - a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun dengan biaya terjangkau (gratis)
 - b. Peningkatan kualitas hasil pendidikan
 - c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik
 - d. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan)

²⁹ rna Haryanti Koestedjo, 'Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017', *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18.1 (2018), pp. 33–46, doi:10.30742/jisa.v18i1.445.

- 
- e. Meningkatkan layanan perpustakaan.
 2. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan
 - a. Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau (gratis)
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan
 - c. Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.
 3. Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha
 - a. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal.
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan.
 - c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK).
 - d. Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif.
 - e. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
 4. Kebijakan pemenuhan hak atas pangan
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian.
 - c. Penganekaragaman produksi pangan.
 - d. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang.
 - e. Peningkatan perlindungan konsumen
 5. Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan

- 
- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan.
 - b. Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat.
 - c. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
6. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih
- a. Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi.
 - b. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air.
 - c. Peningkatan pengetahuan warga miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan sanitasi layak.
 - d. Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
7. Kebijakan pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup
- a. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta terkendalinya pelanggaran penambangan liar (pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan).
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya.
 - c. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau.

- d. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air.
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase dan saluran pembuang.
8. Kebijakan pemenuhan hak atas keadilan dan kesetaraan gender
- a. Penguatan kelembagaan organisasi wanita/penguatan peran wanita dalam pembangunan.
 - b. Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan desa.
 - c. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
 - d. Pemantapan program KB.
 - e. Meningkatkan keluarga sejahtera³⁰

Selain dari faktor pertambahan jumlah penduduk, faktor dari jumlah pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.³¹ Pengangguran menjadi permasalahan di setiap negara maju dan juga negara berkembang, pengangguran di masa sekarang ini merupakan kondisi seseorang yang mencakup sekelompok angkatan kerja yang menginginkan memiliki pekerjaan namun belum juga mendapatkan pekerjaan, meningkatnya pengangguran terjadi disebabkan oleh penduduk desa yang pindah ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan di

³⁰ Ibid

³¹ Alifah Yutina Salsabila, Niniek Imanigsih, and Riko Setya Wijaya, 'Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Gerbang Kertosusila', *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7.1 (2021), p. 35, doi:10.35906/jep01.v7i1.774.

kota, oleh sebab itu dengan banyaknya penduduk desa yang melakukan perpindahan ke kota maka akan semakin padat, sehingga yang mana membuat pengangguran semakin meningkat karena keterbatasan lapangan kerja yang ada di kota. Di Kabupaten Gresik sendiri tercatat pada BPS Kabupaten Gresik bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 8,00%, kemudian mengalami penurunan sebesar 8% di tahun 2022 turun menjadi 7,84% dan pada tahun 2023 Kabupaten Gresik berhasil dengan penurunan tingkat pengangguran yakni 6,82%.³²



³²Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik', 2023
<<https://gresikkab.bps.go.id/indicator/6/401/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-kabupaten-gresik-.html>>.